



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN

JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 38-A MEDAN 20132 – Telp (FAX) : 061-88360055, 88360056
Website : www.pt-medan.go.id – E-mail : sekretariat@pt-medan.go.id

Medan, 31 Mei 2024

Nomor : 2988 /KPT.W.U/KP1.1.8/V/2024
Sifat : Terbatas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun ✓
di-
Simalungun

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan dengan ini disampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Dihimbau agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan pedoman untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun.

Atas perhatian dan kerjamanya disampaikan terima kasih.


Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Pansunan Harahap

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Arsip

	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI MEDAN	Nomor	
		Satker	PN SIMALUNGUN
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MEDAN	Tanggal	31 MEI 2024
	Pengadilan Tinggi Medan Jl. Ngumban Surbakti No. 38 A Medan	Halaman	

NO	Komponen / Sub Komponen Kriteria	Bobot	Nilai Kinerja Tahun Sebelumnya	Nilai Kinerja 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,5	23,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,1	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25	20,10
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,85	76,90
Predikat			BB	BB

I. Catatan Tim Penilai	
A. Perencanaan Kinerja	
1	Pohon kinerja sudah tersedia namun masih belum menjelaskan keterkaitan antar bagian berjenjang secara keseluruhan.
2	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih ada dokumen/kegiatan pendukung yang belum dilakukan Belum adanya jadwal monitoring dan pengukuran kinerja internal secara berkala (Triwulan, Semester dan Tahunan);
3	SOP penyusunan LKjIP sudah ada namun belum menjelaskan peran dari Panitera Muda dan Kasubbag sebagai komponen yang penting dalam pengumpulan data.
B. Pengukuran Kinerja	
1	Sudah ditetapkan SK Tim Pengelola LKJIP namun salinan yang diupload belum distempel.
2	Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
3	Belum ada SOP pengumpulan data capaian kinerja berkala.
4	Sudah bentuk Tim penyusun dan Reviu LKJIP, tim penyusun dan reviu IKU, Renstra namun belum dilengkapi dengan dokumen kegiatan yang sesuai dengan SK penunjukkan Ketua Pengadilan.

C. Pelaporan Kinerja

1	Bagan struktur organisasi belum sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2015.
2	Reviu Laporan Kinerja telah dilaksanakan namun belum ada dokumentasi pelaksanaan reviu.
3	Belum ada perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama lainnya.
4	Satuan kerja belum menjelaskan adanya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1	Belum adanya evaluasi kinerja berkala yang dilakukan oleh satuan kerja.
2	Satuan kerja belum memiliki pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

II. Rekomendasi Tim Penilai

A. Perencanaan Kinerja

1	Satker agar menyusun jadwal monitoring dan pengukuran kinerja secara berkala (Triwulan, Semester dan Tahunan);
2	Agar melibatkan peran tim penyusun LKjIP dalam bagan SOP.

B. Pengukuran Kinerja

1	Satker melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala (Triwulan, Semester dan Tahunan) dan evaluasi dibuat dengan agenda terpisah dari rapat lainnya. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk membahas mengenai terpenuhi atau tidak target pada rencana kinerja tahunan, untuk kemudian diambil kebijakan untuk melakukan revisi target atau tidak;
2	Setiap rapat monitoring dan evaluasi harus disertai dengan dokumentasi, hasil dan tindak lanjut.

C. Pelaporan Kinerja

1	Satker harus menyesuaikan Bagan struktur organisasi dengan Perma No. 7 Tahun 2015.
2	Satuan kerja perlu menjelaskan adanya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.
3	Satuan kerja perlu melakukan perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama lainnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1	Satuan kerja perlu menyusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2	Satker melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala (Triwulan, Semester dan Tahunan) dan evaluasi dibuat dengan agenda terpisah dari rapat lainnya. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk membahas mengenai terpenuhi atau tidak target pada rencana kinerja tahunan, untuk kemudian diambil kebijakan untuk melakukan revisi target atau tidak;

Demikian hasil evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2023, dengan harapan agar rekomendasi ditindaklanjuti dan dipedomani untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya. Unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP agar segera disampaikan ke Pengadilan Tinggi Medan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Medan, 31 Mei 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Parusunan Harahap